



BUPATI LAMONGAN

JAWABAN EKSEKUTIF

**TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN LAMONGAN**

**DALAM RANGKA
PEMBAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2008**



LAMONGAN, 02 JUNI 2009



BUPATI LAMONGAN

JAWABAN EKSEKUTIF

TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PADA RAPAT PARIPURNA TAHUN SIDANG 2009

DALAM PEMBAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2008

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

- YTH. - Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan ;**
- Saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan ;**
 - Saudara Anggota Muspida Kabupaten Lamongan, hadirin dan undangan yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Hadirat Allah SWT, karena atas segala Rahmat dan KaruniaNya, kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kenegaraan dalam rangka pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Perkenankanlah kami atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan atas pandangan dan penilaian terhadap penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2008 beserta dokumen – dokumennya yang telah saya sampaikan pada tanggal 22 Mei 2009 yang lalu. Atas pandangan dan penilaian melalui semua fraksi yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 2009 merupakan masukan yang sangat berharga dengan satu tujuan untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan APBD dikemudian hari.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana kita ketahui bersama merupakan siklus terakhir dari proses pelaksanaan keuangan daerah. Perlu disampaikan bahwa

laporan yang telah disampaikan kepada Dewan Yang Terhormat, telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan yang mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah – jumlah, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Pada tanggal 27 Mei 2009 yang lalu, Kabupaten Lamongan telah mendapatkan Anugerah Otonomi Award, yakni Grand Category untuk Daerah Dengan Terobosan Paling Menonjol Bidang Pembangunan Ekonomi dan Special Category untuk Daerah Dengan Terobosan Inovatif Bidang Pemerataan Ekonomi. Ini berarti selama ada penilaian Otonomi Award yang dilakukan oleh Jawa Pos Institute, Kabupaten Lamongan telah mendapatkan 8 kali anugerah.

Prestasi yang kita raih ini merupakan kerja keras semua pihak. Namun hal ini semuanya bermuara pada satu misi terpenting yang harus di emban oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, yakni menciptakan kemajuan di semua bidang, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja. Prestasi adalah suatu pengakuan dari pihak lain yang memberikan penilaian secara fair atas pelaksanaan pemerintahan yang telah kita lakukan. Dengan prestasi ini marilah kita semua berkonsentrasi untuk bekerja keras dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan Lamongan yang lebih baik dan maju.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Atas tanggapan, penilaian dan pertanyaan yang disampaikan oleh Dewan Yang Terhormat, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fraksi-Fraksi yang masing-masing disampaikan oleh :

1. Yang Terhormat Saudara Hj. NINGSIH MUSYAFACH dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.
2. Yang Terhormat Saudara Drs. MAT ISKAN dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

3. Yang Terhormat Saudara NIPBIANTO, SE. dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

4. Yang Terhormat Saudara H. PURWADI, SH dari Fraksi Partai Golongan Karya

Selanjutnya perkenankanlah saya menyampaikan Jawaban dan atau tanggapan atas pendapat, pemikiran, saran dan himbauan serta pertanyaan yang terhormat Fraksi-Fraksi Dewan yang saya rangkum dalam bidang-bidang , sebagai berikut:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN DAERAH

1. Terhadap permohonan penjelasan Fraksi Kebangkitan Bangsa tentang penurunan penerimaan Dana Penyesuaian pada tahun 2008 dibanding tahun 2007, dapat disampaikan bahwa pada tahun 2007 disamping menerima Dana Penyesuaian Infrastruktur juga menerima dana Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dari Pemerintah Pusat untuk penanganan prasarana pasca bencana alam, dan Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan. Sedangkan untuk penerimaan dana penyesuaian pada tahun 2008 diperoleh

dari dana penyesuaian tunjangan kependidikan dan dana penyesuaian Alokasi Cukai Tembakau.

2. Berkaitan dengan Permintaan penjelasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional tentang adanya penurunan realisasi penerimaan dari pengembalian PPh 21, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2007, ada penerimaan dari Restitusi Pajak dan penerimaan dari pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI). Selanjutnya untuk penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah akan tetap terus diupayakan peningkatannya.
3. Terhadap permohonan penjelasan Fraksi Partai Amanat Nasional tentang terjadinya penurunan pada bagi hasil lainnya dari Pemerintah Propinsi apabila dibandingkan dengan penerimaan pada tahun lalu, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa di tahun 2008 tidak ada penerimaan dari Bagi Hasil Ijin Menetap Tenaga Asing (IMTA).
4. Atas permintaan penjelasan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap penurunan derajat kinerja pendapatan asli daerah tahun 2008 bila dibandingkan dengan tahun 2007 disebabkan beberapa faktor diantaranya

adalah adanya peningkatan pendapatan dari Wisata Bahari Lamongan ditahun 2007. Selain itu dalam tahun 2007 adanya penerimaan dari Restitusi PPh 21 dan pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif. Hal ini juga berdampak besarnya prosentase capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2008 dibandingkan dengan capaian tahun 2007.

5. Disampaikan terima kasih atas saran dan pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto dan laju pertumbuhan apabila dikaitkan dengan menjaga konsistensi Pendapatan Asli Daerah.

Bila dikaitkan dengan PDRB dan laju pertumbuhan dengan kenaikan PAD memang secara langsung tidak ada korelasinya. Hal ini bisa dilihat dari definisi PDRB adalah jumlah nilai produk atau pendapatan, pengeluaran yang dinilai pada suatu wilayah tertentu dan laju pertumbuhan adalah perbandingan antara PDRB atas dasar harga konstan tahun bersangkutan dengan PDRB tahun lalu. Sedangkan PAD merupakan pendapatan yang digali oleh suatu daerah

memanfaatkan tanah-tanah tersebut untuk kegiatan, akan dikenakan sewa sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Terhadap permohonan penjelasan dan harapan Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Partai Amanat Nasional tentang kondisi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya dapat disampaikan bahwa telah diupayakan dengan berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan dengan harapan dapat memberikan kontribusi PAD kepada Pemerintah Daerah. Namun demikian sampai saat ini terobosan yang dilakukan belum memberikan keuntungan/laba secara signifikan sehingga kontribusi PAD baru sebatas pemenuhan target.

10. Disampaikan terima kasih atas permohonan penjelasan dari Fraksi Partai Golongan Karya, berkaitan dengan investasi untuk Pabrik Pupuk Organik Maharani. Sejak tahun 2007 dalam operasionalnya telah diadakan kerjasama Pengelolaan Pabrik Pupuk Organik Maharani antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan PT. Anak Gresik Raya Gresik dimana pihak PT. Anak Gresik Raya selaku pengelola Pabrik Pupuk Organik Petroganik di Kabupaten

Lamongan. Namun dalam perkembangan operasinya, sampai dengan tahun 2008 atau selama 2 tahun masih belum menunjukkan perkembangan yang menguntungkan (mengalami kerugian), sehingga belum bisa memberikan kontribusi PAD kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan. Selanjutnya dengan memperhatikan perkembangan Pabrik Pupuk Organik Petroganik yang masih belum menguntungkan, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan meninjau kembali terhadap Perjanjian Kerjasama dimaksud, sehingga pada tanggal 31 Desember 2008 dilakukan perubahan bentuk kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan PT. Ladang HIJAU Gresik terhadap Pengelolaan Pabrik Pupuk Organik Petroganik Kabupaten Lamongan dalam bentuk kerjasama operasional mulai tanggal 1 Januari 2009 dengan system target, sehingga dalam tahun 2009 ini akan mendapatkan perolehan PAD nya.

11. Disampaikan terima kasih kepada yang Terhormat Fraksi Partai Golongan Karya atas pertanyaan tentang Pajak Galian Golongan C sebesar *204 Juta 997 Ribu 100 Rupiah*.

Mengenai kerusakan lingkungan akibat pengambilan Bahan Galian Golongan C dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melakukan koordinasi pengawasan dengan pihak terkait terutama dalam memberikan ijin penggalian harus memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar dan apabila melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi.

B. BELANJA DAERAH

1. DINAS PENDIDIKAN

Terhadap permintaan penjelasan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa agar kedepan tingkat transparansi seleksi beasiswa mahasiswa lebih ditingkatkan dan hasilnya diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, disampaikan terimakasih dan akan menjadikan perhatian. Adapun mengenai pengembangan bahasa mandarin, telah dikembangkan ditiga SMA Negeri dan pada tahun 2009 telah dikembangkan menjadi tujuh SMA Negeri, salah satunya di sekolah kejuruan. Sedangkan keterlambatan tunjangan fungsional untuk pendidikan

dikarenakan turunya dana dari Pemerintah Pusat dan petunjuk teknisnya mengalami keterlambatan sehingga berpengaruh pada realisasinya.

Atas usul dan saran yang disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai sarana dan prasarana pendidikan, akan menjadikan perhatian pihak eksekutif.

Mengenai permohonan dari Fraksi Partai Golongan Karya dengan Warga Belajar perlu dibekali keterampilan Fungsional, hal tersebut sudah dilaksanakan dan akan ditingkatkan.

2. RSUD DR. SOEGIRI

Terhadap permohonan penjelasan Fraksi Kebangkitan Bangsa terkait dengan belanja yang lebih besar dari yang disediakan, dapat dijelaskan bahwa kelebihan realisasi belanja dikarenakan penerimaan askes melebihi target yang dianggarkan sehingga biaya operasional dan pemeliharaan askes menyesuaikan penerimaan.

3. DINAS PU BINA MARGA

Atas permohonan Fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap program dan kegiatan pemeliharaan rutin masing-masing sebesar 5 juta 500 ribu rupiah, dapat dijelaskan bahwa kegiatan tersebut bukan untuk jenis kegiatan yang sama, namun dipergunakan untuk tiga kegiatan antara lain untuk jasa pemeliharaan servis perlengkapan kantor, peralatan kantor dan pemeliharaan meubelair.

Terhadap saran dan himbauan dari Fraksi Partai Amanat Nasional untuk melakukan upaya nyata dalam melaksanakan pembangunan sarana transportasi di pedesaan serta pembangunan pelosok lainnya, baik kuantitas maupun kualitas serta peningkatan fungsi dan peranan pengawas akan menjadikan perhatian.

Mengenai harapan dari Fraksi Partai Golongan Karya terhadap pembangunan infrastruktur jalan Pekerjaan Umum Kabupaten dan jalan poros desa yang saat ini mengalami kerusakan akibat bencana alam curah hujan tinggi, akan segera dilakukan perbaikan.

4. DINAS PU PENGAIRAN

Mengenai permohonan penjelasan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa atas kegiatan belanja barang dan jasa alat tulis kantor yang terserap habis, hal tersebut dipergunakan untuk menyelesaikan 36 paket kegiatan dan memenuhi kebutuhan alat tulis kantor pada 7 UPT.

5. DINAS PU CIPTA KARYA

Atas permohonan penjelasan yang disampaikan Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Golongan Karya terkait dengan realisasi penyerapan kegiatan jasa konsultasi dan belanja modal konstruksi bangunan pasar dapat dijelaskan bahwa untuk kegiatan pembangunan konstruksinya menggunakan kontrak multi years atau tahun jamak yang dimulai tahun 2008 sampai dengan 2010 dan pada akhir tahun 2008 kemajuan fisiknya mencapai 30% sedangkan penyerapan dana sebesar 25%, selanjutnya akan dianggarkan kembali dalam tahun 2009.

6. DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Mengenai permohonan penjelasan Fraksi Partai Golongan Karya atas kegiatan pendataan dan pengentasan kemiskinan dapat dijelaskan bahwa mekanisme pendataannya meliputi tahap persiapan dengan kegiatan pembekalan pada petugas dan pengadaan blanko. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan meliputi pengumpulan data dari rumah kerumah yang dilakukan oleh kader pendata dan dilaporkan secara berjenjang mulai tingkat dusun sampai ke pemerintah pusat. Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan tahapan pencapaian tingkat kesejahteraan keluarga meliputi 12 variabel. Selanjutnya terkait dengan tindak lanjut pendataan dipergunakan sebagai salah satu data basis untuk pembelian alat kontrasepsi keluarga berencana.

7. KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Atas permohonan penjelasan Fraksi Partai Golongan Karya mengenai pemberangkatan transmigrasi swakarsa

berbantuan dapat dijelaskan bahwa transmigrasi swakarsa berbantuan yang diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang realisasi hak para transmigrasi dalam memperoleh lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi, dimana luas lahan pekarangan yang diterima masing-masing 0,25 hektar, rumah tempat tinggal tipe 36 dan lahan "usaha satu" 0,75 hektar dan "usaha dua" atau belum siap pakai seluas 1 hektar. Sedangkan hak kepemilikan lahan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 yang ketentuan hak kepemilikan lahan akan diberikan apabila transmigran telah menempati lahan tersebut sekurang-kurangnya 5 tahun, adapun kebutuhan sarana produksi dan fasilitas sosial telah dipenuhi dan menjadi satu paket program transmigrasi tersebut.

2. Penjelasan mengenai status hukum asset tetap tanah senilai 1 Trilyun 522 Milyar 609 Juta 833 Ribu 195 Rupiah atau sebanyak 1.278 bidang, dapat disampaikan sebagai berikut:

- Tanah senilai 1 Trilyun 298 Milyar 583 Juta 182 Ribu Rupiah atau sebanyak 583 bidang terdiri dari asset tanah senilai 567 Milyar 345 Juta 873 Ribu 195 Rupiah sudah bersertifikat dan senilai 731 Milyar 237 Juta 309 Ribu Rupiah mempunyai bukti kepemilikan yang sah berupa Berita Acara Serah Terima Penyerahan asset tanah dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur khususnya bidang pengairan, pendidikan dan bidang pertanian ;
- Tanah senilai 224 Milyar 26 Juta 651 Ribu Rupiah atau sebanyak 695 bidang dalam proses sertifikasi secara bertahap. Tanah senilai tersebut di atas terdiri dari tanah jalan-jalan Kabupaten, jalan-jalan Kelurahan dan tanah makam.

3. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008, untuk asset tetap dari SKPD Bupati Kepala Daerah dan Wakil Bupati Kepala Daerah sudah

melekat pada asset tetap Sekretariat Daerah, sedangkan untuk asset tetap Badan Pengawas sudah ada dan akan dilampirkan dalam lampiran keuangan.

Permohonan penjelasan Fraksi Partai Golongan Karya penyebab permasalahan atau kendala atas kemacetan pengembalian pinjaman revolving pada Dinas Perikanan, Peternakan dan Kelautan Kabupaten Lamongan dalam pengadaan sapi bibit, sapi kereman, PMI sawah tambak dan pinjaman kepada Aspela yang terjadi pada tahun 2002, 2003, dan 2004 yang nilainya mencapai 650 juta rupiah dapat disampaikan sebagai berikut;

1. Adanya anggapan bahwa dana revolving tersebut merupakan dana hibah atau bantuan;
2. Penerima Pinjaman sudah meninggal dunia;
3. Penerima Pinjaman pindah keluar daerah;

Sedangkan terhadap siapa yang bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman pasar desa bagi kepala desa yang sudah habis masa jabatannya, dapat dijelaskan bahwa pinjaman tersebut bukan atas nama perorangan akan tetapi atas nama lembaga pemerintah desa yang bersangkutan.

Untuk jangka waktu pinjaman pasar desa tersebut kepada pemerintah daerah adalah 5 sampai dengan 10 tahun,

III. LAIN LAIN

1. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Terhadap harapan tentang peningkatan hasil kualitas pelaksanaan pekerjaan dapat disampaikan bahwa SKPD selaku penanggungjawab kegiatan telah memberikan sanksi apabila pekerjaan tidak sesuai dengan bestek berupa penundaan angsuran pembayaran (termijn) dan selanjutnya angsuran pembayaran dimaksud baru akan dibayarkan kemudian setelah rekanan yang bersangkutan menyempurnakan hasil pekerjaannya.

2. SURAT HAK MILIK TANAH

Disampaikan terima kasih kepada Fraksi Partai Amanat Nasional atas sarannya terkait belanja modal pengadaan tanah untuk surat bukti hak kepemilikan dalam rangka pelepasan hak atas tanah, sebagai alas haknya selalu kami lampirkan, apabila sudah bersertifikat disertakan sertifikat

aslinya dan apabila belum bersertifikat disertakan foto kopi C nya yang dilegalisir Kepala Desa sebagai dasar penguasaan.

3. **WISATA BAHARI LAMONGAN**

Terhadap apresiasi Fraksi Partai Amanat Nasional yang telah memberikan perhatian dan saran demi kemajuan Wisata Bahari Lamongan dapat diuraikan sebagai berikut ;

- a. Pembagian Deviden tetap diserahkan ke kas Daerah Kabupaten Lamongan, sedangkan tahun ini deviden ditarget sebesar 9 milyar 500 juta rupiah.
- b. Adapun untuk saran-saran lainnya mengenai peningkatan pelayanan dan adanya keterwakilan unsur Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan serta perhatian PT. Bumi Lamongan Sejati terhadap masyarakat sekitar WBL, akan kami perhatikan.

4. **SISTEM PENGAWASAN**

Atas saran Partai Amanat Nasional berkaitan dengan peningkatan pengawasan terhadap kualitas pembangunan fisik dan menyarankan Eksekutif untuk melakukan penambahan petugas pengawas proyek, disampaikan terima kasih.

Mengingat untuk penambahan pengawas proyek berkaitan dengan sumber daya manusia (personil) maupun pembiayaan (anggaran), maka untuk itu Eksekutif akan berupaya memaksimalkan dan meningkatkan sumber daya manusia (personil/pengawas lapangan) yang ada. Namun demikian apabila penambahan petugas proyek dirasa sangat dibutuhkan maka Eksekutif akan merealisasikan saran Partai Amanat Nasional tersebut.

5. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Terimakasih atas apresiasi yang diberikan oleh Fraksi Partai Golongan Karya atas realisasi penerimaan Retribusi Kependudukan, selanjutnya eksekutif akan lebih mengintensifkan sosialisasi dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat Lamongan. Perlu dijelaskan bahwa sejak ditetapkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 Eksekutif telah melaksanakan sosialisasi dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat melalui pertemuan tingkat kecamatan, dialog interaktif di RKPD, pengedaran poster dan leaflet.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah keseluruhan jawaban dan penjelasan pihak Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Yang Terhormat yang dapat saya sampaikan pada Sidang Paripurna Tahun Sidang 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2008.

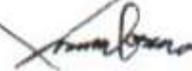
Selanjutnya kepada segenap Hadirin dan Anggota Dewan Yang Terhormat saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya dalam mengikuti keseluruhan jawaban ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Lamongan, 2 Juni 2009

BUPATI LAMONGAN



H. M A S F U K, S H

8. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Atas pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai kemudahan untuk memperoleh modal bagi UKM dan Koperasi, upaya yang dilakukan adalah melalui pemberian informasi pada seluruh masyarakat melalui pusat informasi dan promosi produk unggulan, serta memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku UMKM yang dilaksanakan setiap tahun. Hal tersebut juga sebagai peningkatan peran dan fungsi Dinas Perindagkop dalam upaya peningkatan pengembangan ekonomi berskala mikro.

9. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Atas saran dan masukan Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap optimalisasi sektor pariwisata, dengan memperhatikan peningkatan sarana dan prasarana serta penertiban lalu lintas dijalur pantura, khususnya pada hari libur, akan menjadi perhatian pihak Eksekutif.

10. BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Terhadap permohonan penjelasan Fraksi Partai Golongan Karya mengenai implementasi kegiatan program pelatihan antisipasi demo, kerusuhan dan gangguan keamanan serta pencegahan tindak kriminal, upaya yang dilakukan adalah menyiapkan tenaga personil keamanan serta berkoordinasi dengan Polres dan Kodim. Sedangkan Polisi Pamong Praja kegiatannya dititik beratkan pada penegakan Perda.

11. BADAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

a. Terhadap permohonan penjelasan Fraksi Kebangkitan Bangsa terkait dengan belanja daerah tahun 2008 yang dibelanjakan untuk belanja asset tetap lainnya yang penggunaannya mencapai 99,04% sehingga penyerapannya dipandang tidak efisien, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa belanja asset tetap lainnya tersebut antara lain dipergunakan untuk membeli buku-buku perpustakaan baik di Kantor Arsip dan

Perpustakaan maupun di sekolah sekolah. Disamping itu juga untuk pembelian alat peraga di TK/SD se Kabupaten Lamongan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kegiatan pendidikan sehingga pemanfaatan belanjanya lebih maksimal.

b. Terkait permohonan penjelasan Fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap realisasi belanja transfer bagi hasil dalam bentuk belanja bagi hasil retribusi yang realisasinya melebihi 100%, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa belanja kegiatan bagi hasil retribusi tersebut adalah belanja bagi hasil retribusi parkir berlangganan yang merupakan bagian Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Polres Lamongan. Karena realisasi pendapatan parkir berlangganan melebihi target, maka belanja bagi hasilnya juga ikut meningkat.

c. Adanya sisa realisasi belanja modal yang menurut pengamatan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang hanya terealisasi 90,77% sehingga bisa dipandang sebagai sebuah kemunduran kinerja,

hal tersebut dapat dijelaskan bahwa, pelaksanaan belanja modal adalah berdasarkan penawaran pekerjaan yang dilakukan oleh para rekanan pengguna jasa, sehingga nilainya sesuai dengan kontrak pekerjaan.

- d. Menanggapi analisa yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap besaran proporsi belanja daerah, perlu dipahami bersama bahwa penentuan kebijakan anggaran adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemerintah Daerah. Kami memahami bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, belanja operasional yang merupakan belanja yang bersifat wajib seperti belanja gaji dan belanja operasional yang bersifat administrasi masih menempati porsi yang paling besar. Namun demikian hal tersebut juga semata-mata untuk pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk belanja pembangunan, tetap menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan skeme

pembiayaan melalui APBD maupun pembiayaan lintas sektoral dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat.

- e. Terhadap permohonan penjelasan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai rendahnya realisasi komponen belanja honorarium, hal tersebut dikarenakan adanya tenaga kontrak yang diangkat menjadi PNS, sehingga berakibat banyaknya sisa anggaran yang tidak terserap.

Sedangkan untuk penyerapan belanja modal yang dirasa memiliki kinerja yang rendah, pihak Eksekutif kurang sependapat. Dengan daya serap belanja modal yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dan akuntabilitas, khususnya untuk belanja modal yang sebagian besar telah dilaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih baik, sehingga anggaran dapat ditekan, hal inilah yang menyebabkan realisasi belanja modal dapat mencapai efisiensi hampir 10% pada Tahun Anggaran 2008.

f. Terhadap tanggapan yang disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Kebangkitan Bangsa mengenai turunnya prosentase belanja secara keseluruhan, dan kenaikan belanja Pegawai yang tidak diimbangi dengan peningkatan volume dan output kegiatan, dapat disampaikan bahwa, memang selama 3 tahun terakhir sebagaimana data yang diungkapkan, proporsi belanja secara keseluruhan mengalami penurunan baik ditinjau dari proporsi belanja operasional maupun belanja modal. Penurunan ini disebabkan tidak berimbangya tambahan Pendapatan Daerah khususnya Dana Perimbangan yang dialokasikan untuk kebijakan penambahan pegawai sehingga menyebabkan menurunnya belanja program dan kegiatan. Oleh karena itu, atas saran yang disampaikan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional agar lebih mengefisiensikan belanja, khususnya belanja operasi, maka dalam proses penentuan alokasi belanja tersebut akan lebih dipertajam prioritas dan

plafondnya, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan ekonomi.

Berkaitan dengan hal tersebut saran yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk melakukan evaluasi kinerja aparatur daerah dalam kerangka reformasi birokrasi, merupakan kebijakan yang progresif untuk lebih menekankan efisiensi, sekaligus memaksimalkan kinerja pemerintahan. Langkah pembenahan birokrasi, baik melalui penataan organisasi SKPD yang ditopang peningkatan sumber daya aparatur, telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Sehingga diharapkan mampu menjalankan misi yang diemban baik sebagai penyelenggara pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

- g. Atas tinjauan yang disampaikan mengenai kebijakan belanja hibah, dapat dijelaskan bahwa besarnya belanja hibah yang dialokasikan didalam APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2008 merupakan

kebijakan stimulus pemerataan pembangunan antar wilayah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hibah yang diberikan berupa pembangunan jalan poros desa diharapkan mampu memberikan akses pembangunan sampai ke Desa, selain itu untuk penyediaan asuransi kesehatan kepada masyarakat miskin diluar database, sehingga mampu mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit dan banyak stimulus lagi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

- h. Harapan yang disampaikan agar anggaran belanja hibah ini diimbangi dengan proses akuntabilitas yang memadai, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008, bahwa pemberian dana hibah harus mendapatkan persetujuan Kepala Daerah yang didasarkan alokasi penetapan dana hibah, dimana prosesnya harus melalui pembahasan Rancangan APBD yang ditetapkan oleh DPRD. Dengan demikian mekanisme

pengguliran dana hibah tersebut sudah melalui proses verifikasi.

- i. Saran dari Fraksi Partai Amanat Nasional agar Pemerintah Daerah selalu meningkatkan pendapatan sesuai dengan potensi, akan dilakukan upaya secara terus menerus. Upaya pendataan masing masing potensi baik pajak daerah maupun retribusi daerah dengan menugaskan petugas pemungut yang punya tanggung jawab dan diimbangi dengan pengawasan di lapangan.

12. **DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN**

Disampaikan terima kasih kepada Fraksi Partai Amanat Nasional atas pendapat dan masukan utamanya perhatian terhadap Desa yang terkena bencana banjir, selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka meringankan beban penderitaan petani korban banjir, Pihak Eksekutif pada tahun 2008 telah memberikan bantuan benih padi dan jagung kepada para petani melalui kelompok tani.

Jumlah total bantuan benih padi yang disalurkan adalah sebanyak 61.675 Kg dan untuk benih jagung sebanyak 9.300 Kg, bantuan benih tersebut diberikan secara prioritas.

Disamping itu dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan dan dalam rangka mensukseskan Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) serta meningkatkan kesejahteraan petani maka Pemerintah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Timur melalui APBD tahun 2008 telah melaksanakan perbaikan infrastruktur antara lain :

- a. Jaringan irigasi sepanjang 42.5 Km. sebesar 600 Juta Rupiah yang dipergunakan untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) sebesar 375 Juta Rupiah dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) sebesar 225 Juta Rupiah. Dana tersebut dimanfaatkan untuk perbaikan JITUT pada 8 Kecamatan dan 4 Kecamatan untuk perbaikan JIDES.

b. Jalan usaha tani sepanjang 3.000 M dengan jumlah dana sebesar 150 Juta Rupiah pada 2 Kecamatan 3 Desa antara lain :

- Kecamatan Lamongan 1 Desa yaitu Desa Wajik
- Kecamatan Sekaran 2 Desa yaitu Desa Ngarum dan Desa Titik

Atas saran dan usul Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap keberadaan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan, sudah saatnya memiliki kantor yang representatif lengkap dengan sarana pendukung, baik fisik maupun non fisik, usulan dan pendapat serta saran tersebut sejalan dengan pemikiran Eksekutif, mengingat keberadaan Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan yang dibangun pada tahun 1979 melalui dana APBN, saat ini keberadaannya kurang memenuhi standar pembangunan antara lain :

- Scape bangunan lebih rendah dari jalan raya, sehingga apabila hujan berakibat halaman tergenang air
- Struktur bangunan khususnya atap sudah mulai rusak

- Dengan jumlah staf yang banyak, keberadaan tempat sangat kurang.

Dalam rencana pembangunan renovasi gedung/kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan diusulkan berstruktur tingkat 2 (dua) yang diajukan melalui dana APBD tahun anggaran 2010 dengan kisaran biaya sebesar 3 Milyar 775 Juta Rupiah, ditambah dana untuk sarana pendukung sarana non fisik sebesar 600 Juta Rupiah, dengan demikian diperlukan dana secara keseluruhan sebesar 4 Milyar 375 Juta Rupiah.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Mengenai permohonan penjelasan Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan pengembalian Dana Revolving yang mengalami kemacetan, pihak Pemerintah Daerah dan PD. BPR Bank Daerah terus melakukan prinsip kehati-hatian (prudencial) dan profesional serta memperhatikan kelayakan usaha, sehingga akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih mandiri.

Terkait dengan penerimaan daerah agar ada intensifikasi pengembalian dana-dana revolving tepat waktu sehingga tidak membebani lembaga penyalur, hal tersebut sejalan dengan program Eksekutif.

Sedangkan mengenai dana Revolving agar ditingkatkan minimal 15 sampai dengan 25% setiap tahun anggaran, hal tersebut akan menjadi perhatian Eksekutif untuk dipertimbangkan dan dikaji lebih lanjut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Tentang dana investasi agar diutamakan kepada kegiatan yang mampu menggerakkan potensi basis, menyerap tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan, disampaikan terima kasih hal tersebut sejalan dengan pemikiran Eksekutif.

II. NERACA DAERAH

Terhadap saran Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai penyajian dan pengungkapan asset dalam Neraca, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan telah melakukan pengakuan asset berdasarkan harga perolehan dan melakukan

pengelompokkan aset tetap yang mengalami rusak berat dan tidak dapat diperbaiki menjadi aset non produktif, sehingga nilai aset yang ada di Neraca dapat mencerminkan nilai ekonomis dan nilai manfaat yang sesungguhnya.

Sedangkan mengenai penyelesaian Piutang yang ada di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan akan diselesaikan secara bertahap dan dilakukan dengan pendekatan yang tepat agar tingkat pengembalian piutang dimaksud lebih maksimal.

Terhadap permohonan penjelasan dari Fraksi Partai Golongan Karya terkait dengan Neraca Daerah dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Mengenai penyusutan aset tetap dalam tahun 2008 dapat disampaikan bahwa sampai dengan saat ini aturan mengenai penyusutan aset tetap untuk laporan keuangan daerah belum diatur secara jelas, hanya memberikan prasyarat pemberlakuan penyusutan aset tetap, saat ini Pemerintah Kabupaten Lamongan masih menggunakan basis kas modifikasi menuju akrual, sehingga penyusutan aset tetap belum diterapkan.